

**PENGARUH BELANJA MODAL DAN DANA ALOKASI UMUM  
TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN  
DAERAH DAN *TAX EFFORT* (STUDI KASUS PADA  
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA WILAYAH  
EKS KARESIDENAN SURAKARTA)**



**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas  
Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh :**

**KURNIA RINA ARIANI  
NIM. F0306048**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA  
2010**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul :

**PENGARUH BELANJA MODAL DAN DANA ALOKASI UMUM  
TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN  
DAERAH DAN *TAX EFFORT* (STUDI KASUS PADA  
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA WILAYAH  
EKS KARESIDENAN SURAKARTA)**

**Yang ditulis oleh:**

**Nama : Kurnia Rina Ariani**

**NIM : F0306048**

Surakarta, 22 Juni 2010

Disetujui dan Diterima oleh

Pembimbing



Drs. Eko Arief Sudaryono M.Si., Ak. BKP

NIP. 196112311988031006

## HALAMAN PENGESAHAN

Telah disetujui dan diterima dengan baik oleh tim penguji Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret guna melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi

Surakarta, Juli 2010

### Tim Penguji Skripsi

- |   |            |  |
|---|------------|--|
| 1. <u>Prof. Dr. Hj. Rahmawati, M.Si., Ak</u><br>NIP 196804011993032001      | Ketua      | <br>(.....) |
| 2. <u>Drs. Eko Arief Sudaryono, M.Si., Ak</u><br>NIP 196112311988031006     | Pembimbing | <br>(.....) |
| 3. <u>Dra. Setianingtyas Honggowati, M.M., Ak</u><br>NIP 196004271986012001 | Anggota    | <br>(.....) |

## MOTTO

““You’re good if you trust in the good”  
“and If the mind keeps thinking you’ve had enough, but the  
hearts keeps telling you don’t give up,,, THROUGH IT ALL, JUST  
STAND UP!!!!”

*When you dare to dream, many marvels can be  
accomplished. The trouble is most people never start their  
impossible dreams. (Anonymous)*

**Bahwa mustahil adalah sebuah kata yang tidak masuk akal.  
(Raditya Dika)**

## **PERSEMBAHAN**

**Karya sederhana ini aku persembahkan kepada:**

Bapak dan ibu tercinta yang selalu menyertakan namaku dalam setiap do'a dan sujud mereka kepada Allah SWT, sungguh selalu menyertai dalam setiap langkahku;

Kakaku Ratri yang tersayang dan mbokde Nem, aku bahagia menjadi bagian dari kehidupan kalian, terimakasih untuk do'a dan motivasinya;

Almamaterku tercinta

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, ridho, dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Daerah dan *Tax Effort* (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah Eks Surakarta)”.

Penulis menyadari banyak pihak yang telah membantu dan memberi dukungan, semangat, serta pemikiran baik secara langsung maupun tidak langsung yang berupa saran, kritik, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Sutopo, M.Com., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Drs. Jaka Winarna M.Si., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Drs. Eko Arief Sudaryono M.Si, Ak., selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan sehingga skripsi ini dapat disusun dengan baik dan lancar.
4. Christiyarningsih B, SE, Msi, Ak., selaku pembimbing akademik yang telah memberikan banyak masukan dan arahan selama menempuh kuliah.
5. Bapak-Ibu Dosen, TK, SD, SMP dan SMA, terimakasih telah membekaliiku dengan segala ilmu pengetahuan yang diberikan.

6. Ayah & Ibu: untuk ayah dan ibuku yang tercinta, terimakasih untuk semua usaha, kerja keras, kasih sayang, bimbingan, doa yang selalu kalian alunkan setiap waktu untuk kebaikan dan keberhasilan anak-anakmu ini. Tanpa kalian rina tidak mungkin bisa seperti ini. Ayah dan Ibu adalah anugerah terindah yang rina miliki. I love u and always.
7. Mbak Ratri (tati) yang paling ku sayang: terimakasih ya mbak buat doanya dan semangatnya, terimakasih juga buat bantuannya walaupun kalau ditanya banyak lupanya. Semoga adek bisa menyusulmu di Kemenkeu , semoga Allah memberikan jalan terbaik buat kita semua. Doanya ya kak.
8. Denem: De makasih ya sudah momong rina selama ini makasih buat doa dan kesabarannya ngadepin kenakalanku. Makasih untuk semua yang telah engkau berikan untuk kami semua.
9. Keluarga besar di Klaten atas segala bentuk dukungannya..
10. Buat yeny temen seperjuanganku, ayo yen semangat, buat ririn, ragil dan nicky terimakasih ya selalu menemani aku saat kompre. Kompre yang sangat melelahkan ternyata. Terimakasih buat semua canda tawanya dari semester awal sampai akhir.
11. Buat Danik, ayo mbul karaokean lagi sama di Bee's. Buat tita ayo skripsinya cepat diselesaikan, kalau bisa kita wisuda bareng.
12. Buat Vita,terimakasih buat pencerahan skripsinya, akhirnya gantian aku yang nulis. Tetap semangd buat beasiswa di Australia.
13. Kiky, Raras dan Choir, terimakasih sudah mengajari Rina dasar spss.

14. Teman-teman akuntansi angkatan 2006, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala bentuk kritik dan masukan sangat diharapkan. Terakhir semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Surakarta, Juni 2010

Penulis



## **DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>ABSTRAKSI</b> .....	ii
<b>ABSTRACT</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
 <b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
 <b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori.....	10
1. Keuangan Daerah .....	10
2. Indikator Kinerja Keuangan Daerah.....	11

3. Dana Alokasi Umum.....	15
4. Belanja Modal.....	18
B. Tinjauan Penelitian Sebelumnya.....	19
C. Pengembangan Hipotesis.....	22

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

A. Ruang Lingkup Penelitian.....	26
B. Populasi dan Sampel Penelitian.....	26
C. Teknik Pengumpulan Data.....	27
D. Pengukuran Variabel Operasional.....	27
E. Model Penelitian.....	31
F. Metode Analisis Data.....	32
G. Pengujian Hiptesis.....	35

### **BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

A. Populasi dan Sampel .....	37
B. Upaya Peningkatan Pajak Daerah Di Wilayah Eks Karisedenan Surakarta.....	38
C. Statistik Dekriptif.....	40
D. Pengujian Asumsi Klasik.....	43
1. Uji Normalitas.....	44
2. Uji Autokorelasi.....	45
3. Uji Multikolinearitas.....	47
4. Uji Heteroskedastisitas.....	48

E. Pengujian Hipotesis.....	50
1. Koefisien Determinasi.....	51
2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	52
3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).....	54

## **BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	61
B. Implikasi.....	62
C. Keterbatasan dan Saran.....	63

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

TABEL		Halaman
3. 1	Pengukuran Variabel Penelitian.....	30
4.1	Kabupaten/Kota Sampel .....	37
4. 2	Statistik Deskriptif Untuk Variabel Dependen Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.....	40
4. 3	Statistik Deskriptif Untuk Variabel Dependen <i>Tax Effort</i> .....	42
4. 4	Hasil Uji Normalitas Untuk Variabel Dependen Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.....	44
4. 5	Hasil Uji Normalitas Untuk Variabel Dependen <i>Tax Effort</i> .....	45
4.6	Hasil Uji Autokorelasi Untuk Variabel Dependen Tingkat Kemandirian Daerah.....	46
4.7	Hasil Uji Autokorelasi Untuk Variabel Dependen <i>Tax Effort</i> .....	47
4.8	Hasil Uji Multikolinearitas.....	48
4.9	Koefisien Determinasi Tingkat Kemandirian Daerah.....	51
4.10	Koefisien Determinasi <i>tax Effort</i> .....	52
4.11	Hasil Uji F untuk Variabel Dependen Tingkat Kemandirian Daerah.....	53
4.12	Hasil Uji F untuk Variabel Dependen <i>Tax Effort</i> .....	54

4.13	Hasil Uji t untuk Variabel Dependen Tingkat Kemandirian Daerah.....	55
4.14	Hasil Uji t untuk Variabel Dependen <i>Tax Effort</i> .....	57

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR		Halaman
3.1	Model Penelitian.....	31
4.1	Uji Heteroskedastisitas Variabel Dependen Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.....	49
4.2	Uji Heteroskedastisitas Variabel Dependen <i>Tax</i> <i>Effort</i> .....	50

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Rekap Data Keuangan Kabupaten/Kota Wilayah Karesidenan Surakarta

Lampiran 2. Output Uji Normalitas

Lampiran 3. Output Uji Autokorelasi

Lampiran 4. Output Uji Multikolinearitas

Lampiran 5. Output Uji Heteroskedastisitas

Lampiran 6. Output Uji Regresi

**PENGARUH BELANJA MODAL DAN DANA ALOKASI UMUM  
TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN DAERAH DAN  
TAX EFFORT (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH  
KABUPATEN/KOTA WILAYAH EKS  
KARESIDENAN SURAKARTA)**

**Kurnia Rina Ariani  
F0306048**

**ABSTRAKSI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanja modal dan dana alokasi umum terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan *tax effort* pada pemerintah kabupaten/kota wilayah eks Karesidenan Surakarta.

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan desain penelitian kausal, dengan jumlah sampel 7 kabupaten/kota di wilayah eks Karesidenan Surakarta. Penelitian ini dilakukan untuk periode 2001-2008. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data Sekunder yang digunakan diperoleh melalui situs badan pusat statistik dan Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan ([www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)). Data yang dianalisis dalam penelitian ini diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan analisis data yang terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi.

Hasil penelitian menunjukkan belanja modal mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan dana alokasi umum berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Untuk variabel dependen *tax effort*, belanja modal mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap *tax effort* dan dana alokasi umum tidak mempunyai pengaruh terhadap *tax effort*.

Kata kunci: belanja modal, dana alokasi umum, tingkat kemandirian keuangan daerah, *tax effort*.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Otonomi daerah yang secara resmi diberlakukan di Indonesia mulai 1 Januari 2001 yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah direvisi dengan UU No. 33 Tahun 2004, menghendaki daerah untuk berkreasi mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Otonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah sehingga daerah bebas untuk mengatur dirinya tanpa ada campur tangan pemerintah pusat.

Sesuai asas *money follows function*, penyerahan kewenangan daerah juga diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pembiayaan yang sebelumnya masih dipegang oleh Pemerintah Pusat. Dengan demikian Daerah menjadi mampu untuk melaksanakan segala urusan pemerintahannya sendiri karena sumber-sumber pembiayaan sudah diserahkan kepada pemerintah daerah. Apabila mekanisme tersebut sudah terwujud maka cita-cita kemandirian Daerah dapat direalisasikan. Sumber-sumber pembiayaan yang

diserahkan kepada daerah itu nantinya akan dimanifestasikan lewat struktur PAD yang kuat. PAD inilah sumber pembiayaan yang memang benar-benar digali dari daerah itu sendiri sehingga dapat mencerminkan kondisi riil daerah, apabila struktur PAD kuat, maka dapat dikatakan daerah tersebut mempunyai kemampuan pembiayaan yang juga kuat sehingga dapat mewujudkan kemandirian keuangan daerah (Muliana, 2008).

Pada daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang rendah cenderung mengalami tekanan fiskal yang kuat (Adi, 2006). Rendahnya kapasitas ini mengindikasikan tingkat kemandirian keuangan daerah yang masih rendah. Sehingga dalam upaya peningkatan tingkat kemandirian keuangan daerah pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya dengan memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif. Pergeseran komposisi belanja ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal. Wong (2004) menemukan bahwa pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002).

Namun terdapat kendala dalam implementasi otonomi daerah, yaitu adanya kesenjangan fiskal antar daerah. Untuk itu, pemerintah pusat memberikan bantuan (transfer) kepada pemerintah daerah, salah satunya dengan pemberian dana alokasi umum (DAU). Realitas menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum dapat sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat di

dalam mengatur rumah tangga daerah, yang ditunjukkan dengan adanya ketergantungan yang lebih besar kepada dana alokasi umum (DAU) dibandingkan pendapatan asli daerah dalam mendanai belanja daerah. Dominannya peran transfer relatif terhadap PAD dalam membiayai belanja pemerintah daerah sebenarnya tidak memberikan panduan yang baik bagi pemerintahan terhadap aliran transfer itu sendiri (Rizky dan Suryo, 2009). Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian dari Nagathan dan Sigvagnanam (1999) yang menemukan pengaruh negatif antara besarnya DAU dan *tax effort* daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah cenderung mempertahankan penerimaan DAU dikarenakan jumlahnya yang sangat besar daripada mengupayakan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah daerah itu sendiri.

Sarug dan Sagbas (2008) menemukan bahwa dana transfer ke pemerintah daerah (*intergovernmental transfer*) dapat menjadi substitusi ataupun dapat menjadi stimulus dalam belanja daerah. Apabila efek substitusi ditemukan maka pemerintah daerah akan mengeluarkan pengeluaran yang lebih sedikit dibandingkan dengan dana transfer dari pemerintah pusat yang mereka terima yang dapat menyebabkan penurunan penerimaan pajak. Sebaliknya apabila efek stimulus yang ditemukan, diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan upaya pajak daerahnya. Akan tetapi pemberian DAU yang seharusnya menjadi stimulus peningkatan kemandirian daerah, justru direspon berbeda oleh daerah, daerah tidak menjadi lebih mandiri semakin bergantung pada pemerintah pusat (Adi, 2008). Pemberian DAU

yang semula bertujuan untuk mengurangi kesenjangan horizontal, justru menjadi disinsentif bagi daerah untuk mengupayakan peningkatan kapasitas fiskal daerahnya. Upaya pajak menjadi lebih rendah, harapan adanya peningkatan kemandirian daerah justru menjadi semakin jauh.

Dari sisi penerimaan APBD Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karesidenan Surakarta tahun 2001-2008 pada lampiran 2, penerimaan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan merupakan yang terbesar. Dari sisi pengeluaran, anggaran terbesar diperuntukan bagi belanja rutin namun dari data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) pengalokasian belanja modal Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karesidenan Surakarta rata-rata dari tahun ke tahun cenderung meningkat, hal ini mengindikasikan upaya Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karesidenan Surakarta dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui investasi modal diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi. Dengan terpenuhinya fasilitas pelayanan publik maka masyarakat akan merasa nyaman dan dapat menjalankan usahanya dengan efektif dan efisien sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kontribusi publik terhadap pajak (Bati, 2009).

Penelitian mengenai tingkat kemandirian keuangan daerah dan *tax effort* belum terlalu banyak dilakukan diberbagai negara, misalnya: India (Sivagnanam and Naganathan 1999) melakukan penelitian mengenai pengaruh pemberian dana transfer pemerintah pusat terhadap *tax effort* India. Sivagnanam dan Naganthan menggunakan variabel independen *per capita*

*Finance Commission transfers (PFC), per capita plan grants (PPG), per capita non-plan grants (PNPG) dan percapita State domestic product (PCSDP)*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan variabel independen yang mempunyai pengaruh negatif signifikan dengan tingkat signifikansi sebesar 10% adalah *per capita non-plan grants (PNPG)* atau di Indonesia disebut dana alokasi umum. Turki ( Saruc dan Sagbas 2008) melakukan penelitian mengenai dampak pembedahan *flypaper* serta dampak substitusi dan stimulasi pada upaya pajak daerah di Turki. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pada provinsi yang kaya di Turki pemberian transfer pemerintah memberikan dampak stimulus untuk meningkatkan upaya pajak daerah sedangkan untuk provinsi yang miskin pemberian transfer pemerintah memberikan dapat substitusi karena pemerintah daerah hanya mengeluarkan sedikit dana transfer pemerintah pusat dan menyimpannya untuk tambahan pendapatan daerahnya. Wong (2004) melakukan penelitian mengenai pengaruh fiskal dalam pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pemerintah daerah. Wong menemukan bahwa pembangunan infrastuktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD.

Sedangkan di Indonesia (Brodjonegoro dan Vazquez 2002) melakukan analisis mengenai pemberian transfer pemerintah pusat. Hasil penelitian tersebut tidak menemukan DAU mempunyai pengaruh terhadap *tax effort* di

Kabupaten / Kota di Indonesia. Kuncoro (2004) melakukan penelitian mengenai pengaruh transfer antar pemerintah pada kinerja fiskal pemerintah daerah kota dan kabupaten di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan peningkatan alokasi transfer diikuti dengan penggalan PAD yang lebih tinggi. Simpulan ini mengindikasikan sikap overaktif pemerintah daerah terhadap arti pentingnya transfer. Sedangkan Adi (2008) melakukan penelitian mengenai relevansi transfer pemerintah pusat dengan upaya pajak daerah pada pemerintah kota dan kabupaten se Jawa. Penelitian ini menggunakan variabel dependen *tax effort* (usaha pajak daerah) dan variabel independen dana alokasi umum. Adi menemukan bahwa DAU tidak memberikan pengaruh terhadap upaya pajak daerah. Rizky dan Suryo (2009) meneliti pengaruh PAD dan belanja pembangunan terhadap rasio kemandirian dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan variabel independen PAD dan belanja pembangunan sedangkan variabel dependennya rasio kemandirian dan belanja pembangunan. Hasil dari penelitian ini PAD dan belanja pembangunan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap rasio kemandirian daerah di DIY. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak dipengaruhi oleh PAD dan belanja pembangunan.

Muliana (2009) melakukan penelitian pengaruh rasio efektivitas PAD, DAU, dan DAK terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Muliana menemukan bahwa penelitian secara parsial hanya Rasio Efektivitas PAD yang mempengaruhi tingkat kemandirian daerah. Sedangkan secara simultan Rasio Efektivitas PAD, DAU dan DAK memberikan pengaruh positif

terhadap tingkat kemandirian daerah. Hasil penelitian tersebut beragam karena perbedaan variabel dan metode statistik yang digunakan. Karena perbedaan tersebut penulis untuk mencari bukti lain yang berkaitan dengan pengaruh belanja modal dan dana alokasi umum terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan *tax effort*.

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Penulis mengambil judul **“Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan *Tax Effort* (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah Eks Surakarta)”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah belanja modal dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karesidenan Surakarta?
2. Apakah belanja modal dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap *tax effort* pada Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karesidenan Surakarta

### C. TUJUAN PENELITIAN

Dari perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh belanja modal dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karesidenan Surakarta.
2. Untuk menganalisis belanja modal dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap *tax effort* pada Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karesidenan Surakarta.

### D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi pemerintah daerah  
Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui pengaruh belanja modal dan dana alokasi umum terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan *tax effort*. Dari sini diperoleh bahan dan masukan bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan serta menentukan arah dan strategi pembangunan di masa yang akan datang.
2. Bagi peneliti  
Menambah pengetahuan dan wawasan peneliti baik dalam hal penelitian maupun obyek penelitian, yang dalam hal ini adalah pengaruh



dana alokasi umum dan belanja modal terhadap *tax efforts* dan tingkat kemandirian keuangan daerah.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Keuangan Daerah**

Menurut Pasal 1, ayat 5 dari PP No. 58/ 2005 menyatakan: “Keuangan daerah secara umum diartikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”.

Ruang lingkup keuangan daerah mencakup ( Permendagri No. 13/ 2006, Pasal 2) :

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.
3. Penerimaan daerah, yaitu uang yang masuk ke kas daerah.
4. Pengeluaran daerah, yaitu uang yang keluar dari kas daerah
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.

6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah atau kepentingan umum.

Sedangkan menurut Halim dalam Muliana (2009), ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan yang dipisahkan. Yang termasuk keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dalam Pasal 1, ayat (7) pengelolaan Keuangan Daerah diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dalam konteks yang lebih sempit pada dasarnya adalah pengelolaan terhadap APBD yang dilakukan setiap tahun sekali oleh daerah, baik oleh pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kabupaten/ Kota.

## **2. Indikator Kemandirian Keuangan Daerah**

Berdasarkan konsep Musgrave dan Musgrave (1980) dalam buku Ekonomi Publik (Sukanto Reksohadiprojo) dan juga proxy menurut Hikmah dalam buku Aspek dan Dimensi Keuangan Daerah di Era Otonomi dan Desentralisasi Fiskal (Mulyanto, 2007) indikator kinerja keuangan daerah sebagai berikut:

### **a. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Muliana, 2009). Tingkat kemandirian keuangan daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada umumnya ditunjukkan oleh variabel-variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD), Rasio Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak untuk Daerah (BHPBP) terhadap TPD, dan Rasio Sumbangan Bantuan Daerah (SBD) terhadap TPD. Untuk melihat kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah khususnya di bidang keuangan, diukur dari seberapa jauh kemampuan pembiayaan urusan bila didanai sepenuhnya oleh PAD dan Bagi Hasil Daerah (Mulyanto, 2007: 93).

Dalam mengukur tingkat kemandirian daerah ini, Muliana (2009) mengukurnya dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah dengan Total Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Daerah dalam Laporan Realisasi APBD.

Tujuan kemandirian keuangan daerah mencerminkan suatu bentuk pemerintahan daerah apakah dapat menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Menurut Widodo (dalam Halim, 2002) Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber

dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah.

#### **b. Kebutuhan Fiskal**

Kebutuhan fiskal ini dapat diartikan pula sebagai biaya pemeliharaan prasarana sosial ekonomi seperti angkutan dan komunikasi, lembaga pendidikan dan kesehatan. Variabel-variabel kebutuhan daerah (*fiscal need*) dibagi atas variabel kependudukan dan variabel kewilayahan. Variabel kependudukan meliputi jumlah penduduk dan indeks kemiskinan relatif (proksi: *poverty gap*). Sementara itu untuk variabel kewilayahan meliputi luas wilayah dan indeks kemahalan harga bangunan.

#### **c. Kapasitas Fiskal**

Kapasitas fiskal adalah sejumlah pajak yang seharusnya mampu dikumpulkan dari dasar pajak (*tax base*), yang biasanya berupa pendapatn per kapita yang merupakan suatu komponen yang masuk di dalam formula penghitungan dana alokasi umum (DAU). DAU itu

sendiri adalah salah satu komponen di dalam dana perimbangan di APBN yang pengalokasiannya didasarkan atas formula dengan konsep Kesenjangan Fiskal (*Fiscal Gap*) yang merupakan selisih antara Kebutuhan Fiskal (*Fiscal Need*) dengan Kapasitas Fiskal (*Fiscal Capacity*). DAU bertujuan sebagai instrumen untuk mengatasi masalah *horizontal imbalances* yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan Keuangan antar daerah dimana penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah (*block grants*). Upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah sebenarnya tidak hanya menyangkut peningkatan PAD. Peningkatan kapasitas fiskal daerah pada dasarnya adalah optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah.

#### ***d. Tax Effort***

Besarnya penerimaan pajak sebagai sumber pembiayaan dalam suatu daerah bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkannya. Kemampuan tersebut harus didukung dengan kemampuan aparat fiskus yang baik dan kesadaran masyarakat pajak

Menurut Mulyanto (2007) Upaya fiskal atau *tax effort* adalah jumlah pajak yang sungguh-sungguh dikumpulkan oleh kantor pajak dan dilawankan dengan potensi pajak (*tax capacity potensial*). Usaha pajak dapat diartikan sebagai rasio antara penerimaan pajak dengan kapasitas atau kemampuan bayar pajak di suatu daerah. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui kemampuan membayar masyarakat adalah

produk domestik regional bruto (PDRB). Jika PDRB suatu daerah meningkat, maka kemampuan daerah dalam membayar (*ability to pay*) pajak juga akan meningkat.

Sedangkan menurut Adi (2006), upaya pajak (*Tax Effort*) dapat digunakan untuk menganalisis posisi fiskal suatu daerah yaitu dengan membandingkan penerimaan pajak terhadap kapasitas fiskal. Dengan demikian posisi fiskal sama dengan upaya pengumpulan pajak. Nilai *tax effort* yang diperoleh dari perbandingan penerimaan pajak terhadap kapasitas fiskal tersebut berkisar 0-1. Adi (2006) menyatakan untuk menentukan fiskal disuatu daerah apakah lemah atau kuat tergantung standar yang digunakan. Secara sederhana disebutkan, bila  $T_e$  mendekati satu maka dapat dikatakan posisi fiskal suatu daerah kuat, dan bila mendekati 0 posisi fiskal lemah. Menurut Devas dalam Adi (2006) menyebutkan upaya pengumpulan pajak daerah adalah perbandingan penerimaan pajak dibagi dengan kemampuan bayar pajak. Kemampuan bayar pajak secara keseluruhan dapat berupa produk domestik regional bruto (PDRB) .

### **3. Dana Alokasi Umum**

Dana alokasi umum merupakan pendapatan daerah yang berasal dari kelompok dana perimbangan.

Dalam Pasal 1, Ayat 21 dari UU No. 33/2004, dijelaskan bahwa

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa DAU merupakan sarana untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah dan disisi lain juga sebagai sumber pembiayaan daerah. Hal ini berarti pemberian DAU lebih diprioritaskan pada daerah yang mempunyai kapasitas fiskal rendah. Daerah yang mempunyai kapasitas fiskal tinggi justru akan mendapat jumlah DAU yang lebih kecil, sehingga diharapkan dapat mengurangi disparitas fiskal antar daerah dalam memasuki era otonomi (Adi, 2006).

Konsep dasar formulasi DAU sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No 25 Tahun 1999 itu secara implisit merupakan penjabaran dari teori *governmental transfer* yang berbasis pada konsepsi *fiscal gap*, dengan konsepsi *fiscal gap*, nantinya kesenjangan fiskal yang merupakan selisih negatif antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal dianggap sebagai kebutuhan yang harus ditutup melalui transfer pemerintah pusat.

Adapun cara menghitung dana alokasi umum menurut ketentuan adalah sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Umum (DAU) di tetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang di tetapkan dalam APBN.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah propinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum sebagaimana di tetapkan di atas.



3. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk seluruh daerah kabupaten/kota yang ditetapkan dalam APBN dengan porsi daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
4. Porsi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Menurut Kuncoro (2004) transfer DAU dapat digolongkan sebagai bantuan umum. Namun, karena situasi dan kondisi keuangan yang dihadapi, pemerintah daerah terpaksa mengalokasikan DAU untuk membiayai gaji. Inpres sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam transfer tak bersyarat karena merupakan bantuan umum (*block grant*).

Menurut Hanley *et al* dalam Mardiasmo (2002:157) mengidentifikasi beberapa tujuan pemerintah pusat memberikan bantuan dalam bentuk *grant* kepada pemerintah daerah adalah:

1. Untuk mendorong terciptanya keadilan antar wilayah (*geographical equity*)
2. Untuk meningkatkan akuntabilitas (*promote accountability*)
3. Untuk meningkatkan sistem pajak yang lebih progresif. Pajak daerah cenderung kurang progresif, membebani pajak yang tinggi kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah.
4. Untuk meningkatkan keberterimaan (*acceptability*) pajak daerah. Pemerintah pusat mensubsidi beberapa pengeluaran pemerintah daerah untuk mengurangi pajak daerah.

#### 4. Belanja Modal

Belanja daerah dikelompokkan menjadi belanja langsung dan tidak langsung. Biaya langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 53

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Belanja modal memiliki karakteristik yang spesifik yang menunjukkan berbagai pertimbangan dalam pengalokasiannya. Pemerolehan aset tetap juga memiliki konsekuensi pada beban operasional dan pemeliharaan di masa yang akan datang (Bati, 2009). Keberadaan anggaran belanja modal yang bersumber dari bantuan pusat dan pendapatan asli daerah, yang apabila dibandingkan dengan investasi swasta mempunyai nilai yang relatif kecil, namun belanja modal tersebut mempunyai peranan strategis, karena sasaran penggunaannya untuk membiayai pembangunan dibidang sarana dan prasana yang dapat menunjang kelancaran usaha swasta dan pemenuhan pelayanan masyarakat. Belanja modal merupakan belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah (Mulyanto, 2007). Tersedianya struktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas di

berbagai sektor, produktivitas masyarakat diharapkan menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya akan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

## **B. Tinjauan Penelitian Sebelumnya**

Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini diantaranya:

1. Sivagnanam and Naganathan (1999) melakukan penelitian mengenai pengaruh pemberian dana transfer pemerintah pusat terhadap *tax effort* India. Sivagnanam dan Naganathan menggunakan variabel independen *per capita Finance Commission transfers (PFC)*, *per capita plan grants (PPG)*, *per capita non-plan grants (PNPG)* dan *percapita State domestic product (PCSDP)*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan variabel independen yang mempunyai pengaruh negatif signifikan dengan tingkat signifikansi sebesar 10% adalah *per capita non-plan grants (PNPG)* atau di Indonesia disebut dana alokasi umum.
2. Brodjonegoro dan Vazquez (2002) melakukan analisis mengenai pemberian transfer pemerintah pusat. Hasil penelitian tersebut tidak menemukan DAU mempunyai pengaruh terhadap *tax effort* di Kabupaten / Kota di Indonesia.
3. Sarug dan Sagbas (2008) melakukan penelitian mengenai dampak pembedahan flypaper serta dampak substitusi dan stimulasi pada upaya pajak daerah di Turki. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pada provinsi yang kaya di Turki pemberian transfer pemerintah

memberikan dampak stimulus untuk meningkatkan upaya pajak daerah sedangkan untuk provinsi yang miskin pemberian transfer pemerintah memberikan dapat substitusi karena pemerintah daerah hanya mengeluarkan sedikit dana transfer pemerintah pusat dan menyimpannya untuk tambahan pendapatan daerahnya.

4. Kuncoro (2004) melakukan penelitian mengenai pengaruh transfer antar pemerintah pada kinerja fiskal pemerintah daerah kota dan kabupaten di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan peningkatan alokasi transfer diikuti dengan penggalan PAD yang lebih tinggi. Simpulan ini mengindikasikan sikap overaktif pemerintah daerah terhadap arti pentingnya transfer. Bagi pemerintah pusat, transfer memang diharapkan menjadi pendorong agar pemerintah daerah secara intensif menggali sumber-sumber penerimaan sesuai kewenangannya. Namun, penggalan PAD yang hanya didasarkan pada faktor inkremental akan berakibat negatif pada perekonomian daerah.
5. Wong (2004) melakukan penelitian mengenai pengaruh fiskal dalam pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pemerintah daerah. Wong menemukan bahwa pembangunan infrastuktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat

partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD.

6. Adi (2008) melakukan penelitian mengenai relevansi transfer pemerintah pusat dengan upaya pajak daerah pada pemerintah kota dan kabupaten se Jawa. Penelitian ini menggunakan variabel dependen *tax effort* (usaha pajak daerah) dan variabel independen Dana Alokasi Umum. Priyo menemukan bahwa DAU tidak memberikan pengaruh terhadap upaya pajak daerah.
7. Bati (2009) melakukan analisa pengaruh belanja modal dan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten kota Sumatra Utara yang menggunakan belanja modal dan PAD sebagai variabel independen dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa secara simultan belanja modal dan PAD berpengaruh signifikan terhadap besarnya pertumbuhan ekonomi, sedangkan secara parsial hanya PAD yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
8. Rizky dan Suryo (2009) meneliti pengaruh PAD dan belanja pembangunan terhadap rasio kemandirian dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan variabel independen PAD dan belanja pembangunan sedangkan variabel dependennya rasio kemandirian dan belanja pembangunan. Hasil dari penelitian ini PAD dan belanja pembangunan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap rasio

kemandirian daerah di DIY. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak dipengaruhi oleh PAD dan belanja pembangunan.

9. Muliana (2009) melakukan penelitian pengaruh rasio efektivitas PAD, DAU, dan DAK terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Muliana menemukan bahwa penelitian secara parsial hanya Rasio Efektivitas PAD yang mempengaruhi tingkat kemandirian daerah. Sedangkan secara simultan Rasio Efektivitas PAD, DAU dan DAK memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kemandirian daerah.

### **C. Pengembangan Hipotesis**

#### **1. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

Dengan otonomi daerah, daerah diberi wewenang untuk menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerahnya masing-masing sehingga mampu untuk membiayai sendiri belanja daerahnya yang terdiri dari belanja operasi (rutin) dan belanja modal. Pembiayaan tersebut diperoleh dari PAD, sehingga perlu dilihat sejauh mana efektivitas dari pendapatan asli daerah tersebut, yang didukung pula oleh dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah setara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang diantaranya berupa dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Semakin efektif pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah (PAD), maka akan memperbesar atau meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah yang diperoleh. Jika jumlah PAD cukup besar maka diharapkan akan menurunkan atau bahkan

menutupi jumlah DAU yang diberikan pemerintah pusat. Jika hal tersebut dapat tercapai maka daerah dikatakan mandiri. Tingkat kemandirian ini ditunjukkan dengan kontribusi PAD untuk mendanai belanja-belanja daerahnya.

Holtz-Eakin *et al* dalam Rizky dan Suryo (2009) menyatakan terhadap keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal. Temuan Prakoso dalam Rizky dan Suryo (2009) menunjukkan bahwa jumlah belanja modal dipengaruhi oleh dana alokasi umum yang diterima dari pemerintah pusat, kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan dari pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat menjadi semakin tinggi. Hal ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan ini.

**H<sub>1</sub>: Belanja Modal berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.**

**H<sub>2</sub>: Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.**

## ***2. Tax Effort***

Upaya pajak (*tax effort*) seringkali diidentikkan dengan tekanan fiskal (*fiscal stress*). Otonomi daerah ditujukan untuk meningkatkan

kemandirian daerah, yang dindikasikan dengan meningkatnya PAD. Upaya Pajak (*Tax Effort*) adalah upaya peningkatan pajak daerah yang diukur melalui perbandingan antara hasil penerimaan (realisasi) sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) dengan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah. *Tax effort* menunjukkan upaya pemerintah untuk mendapatkan pendapatan bagi daerahnya dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki. Potensi dalam pengertian ini adalah seberapa besar target yang ditetapkan pemerintah daerah dapat dicapai dalam tahun anggaran daerah tersebut. Upaya pajak yang berhasil dapat memungkinkan peningkatan PAD, PAD yang kuat dapat digunakan oleh pemerintah untuk membiayai belanja daerah yang diantaranya belanja modal seperti pembangunan dan perbaikan diberbagai sektor. Pembangunan dalam sektor pelayanan kepada publik akan merangsang masyarakat untuk lebih aktif dan bergairah dalam bekerja karena ditunjang dengan fasilitas yang memadai selain itu investor juga akan tertarik kepada daerah karena fasilitas yang diberikan oleh daerah Bati (2009). Dengan bertambahnya produktivitas masyarakat dan investor yang berada di daerah diharapkan dapat lebih meningkatkan PAD melalui pajak daerah.

Transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan fenomena umum, terlebih pada negara yang menerapkan desentralisasi fiskal. Pemberian transfer dalam jangka pendek berfungsi untuk mengatasi ketidaksiapan fiskal daerah dalam berbagai pembiayaan



daerah. Pemberian transfer didasarkan pada kapasitas fiskal daerah, semakin tinggi kapasitas fiskal daerah, maka transfer yang diterima menjadi semakin rendah. Kebijakan ini disatu sisi bisa mengatasi ketidakseimbangan fiskal horizontal, namun disisi lain justru bisa menyebabkan kemalasan fiskal daerah (Nanga dalam Adi 2008). Daerah tidak terpacu untuk meningkatkan potensi lokalnya, dengan meningkatkan PAD, dikarenakan hal ini bisa berimbas pada penurunan penerimaan DAU. DAU seharusnya menjadi insentif bagi daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskalnya. Sivagnanam and Naganathan (1999) memberikan fakta empirik bahwa pemberian transfer yang tidak terencana justru memberikan pengaruh negatif terhadap upaya pengumpulan pajak di tingkat lokal (*tax effort*). Fenomena kemalasan fiskal semacam ini bisa jadi disebabkan adanya kebijakan yang kurang menguntungkan, yaitu adanya pengurangan transfer pemerintah pusat apabila daerah mengalami peningkatan kapasitas fiskal.

**H<sub>3</sub>: Belanja Modal berpengaruh terhadap *Tax Effort*.**

**H<sub>4</sub>: Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap *Tax Effort*.**

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis eskplanatori atau penelitian pengujian hipotesis, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan macam hubungan tertentu, pengaruh, atau menetapkan perbedaan antar kelompok atau independensi dari dua atau lebih faktor dalam suatu objek yang diteliti (Sularso, 2003). Dalam penelitian ini, bertujuan untuk menguji hipotesis yang diajukan yaitu apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen yaitu belanja modal dan dana alokasi umum terhadap variabel dependen yaitu tingkat kemandirian keungan daerah dan *tax effort*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan.

#### **B. Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD di Kabupaten/kota wilayah eks Karesidenan Surakarta tahun 2001-2008.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diambil dari data PDRB dan Laporan Realisasi APBD tahun 2001-2008 Wilayah Eks Karesidenan Surakarta. Data ini diperoleh dari situs [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) dan [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id).

### D. Pengukuran Variabel Operasional

Dalam penelitian ini akan digunakan dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Penjelasan lebih rinci dari variabel-variabel tersebut akan diterangkan pada bagian dibawah ini.

#### 1. Variabel Dependen

Dalam penelitian ini digunakan 2 variabel dependen:

- **Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

Tingkat kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah (Muliana, 2009).

$$\text{Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}}$$

- ***Tax Effort* (Tingkat Absorpsi Pajak)**

*Tax Effort* dapat diartikan sebagai rasio antara penerimaan pajak dengan kapasitas atau kemampuan bayar pajak di suatu daerah. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui kemampuan membayar masyarakat adalah produk domestik regional bruto. Secara praktis *tax effort* dapat didefinisikan rasio antara penerimaan pajak per-kapita dengan PDB per-kapita yang dipakai sebagai ukuran *tax capacity*. Di Indonesia sebagai indikator penerimaan pajak dipakai penerimaan pajak non migas dan PDB non migas, sehingga akan didapatkan rasio *tax effort* yang riil. Dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dari sisi pendapatan secara makro *tax effort* diukur dengan membandingkan realisasi PAD terhadap PDRB indikator ini mengukur sejauh mana pemerintah daerah menciptakan pendapatan (*generating income*) berdasarkan kapasitas dan potensi lingkungan ekonomi di daerahnya (BAPPENAS).

$$\frac{\text{Penerimaan pajak aktual di daerah } j}{\text{Kapasitas pajak di daerah } j} \times 100\%$$

## 2. Variabel Independen

Dalam penelitian ini digunakan dua variabel yang akan diuji dalam hubungannya dengan pengaruh yang diberikan terhadap tingkat kemandirian

keuangan daerah dan *tax effort*. Variabel independen tersebut adalah belanja modal dan adalah dana alokasi umum.

- **Belanja Modal**

Belanja modal adalah jumlah realisasi seluruh belanja pembangunan seperti infrastruktur, investasi baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Belanja modal meliputi belanja tanah, gedung dan bangunan, belanja peralatan dan mesin, belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja aset tetap lainnya.

- **Dana Alokasi Umum**

Dana Alokasi Umum (DAU) termasuk dalam Dana Perimbangan, adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU merupakan sarana untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah dan disisi lain juga sebagai sumber pembiayaan daerah. Hal ini berarti pemberian DAU lebih diprioritaskan pada daerah yang mempunyai kapasitas fiskal rendah.

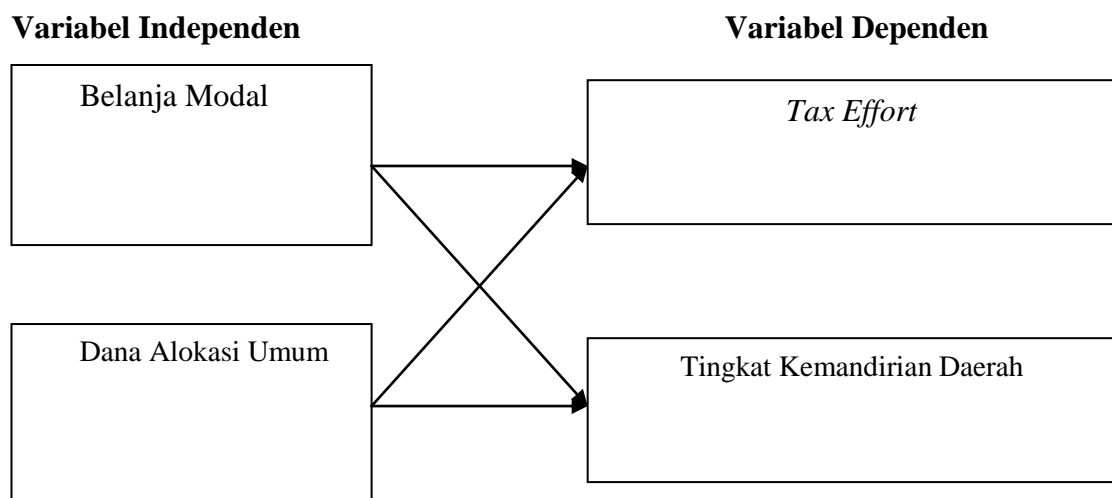
Tabel 3.1. Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala	Instrumen
<i>Dependent Variable</i>				
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Tingkat Kemadiraan Keuangan daerah</b></li> </ul>	kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah	$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Rasio	Laporan Realisasi APBD
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Tax Effort</b></li> </ul>	mengukur sejauh mana pemerintah daerah menciptakan pendapatan ( <i>generating income</i> ) berdasarkan kapasitas dan potensi lingkungan ekonomi di daerahnya	$\frac{\text{Pajak Daerah } j}{\text{Kapasitas Pajak Daerah } j}$	Rasio	Laporan Realisasi APBD dan data PDRB
<i>Independent Variable</i>				
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Belanja Modal</b></li> </ul>	Belanja modal adalah jumlah realisasi seluruh belanja pembangunan seperti infrastruktur, investasi baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung.		Rasio	Laporan Realisasi APBD

<ul style="list-style-type: none"> <li>Dana Alokasi Umum (DAU)</li> </ul>	<p>Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi</p>		Rasio	Laporan Realisasi APBD
---	--	--	-------	------------------------

### E. Model Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka model penelitian ini adalah:



Gambar 3.1

Model Penelitian

Metode yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah metode regresi linear berganda (*Multiple Linear Regression*). Berdasarkan model di atas, maka persamaan regresinya dapat ditulis secara matematik sebagai berikut:

$$TK_i = \beta_0 + \beta_1 BELMOD_i + \beta_2 DAU_i + \mu_i$$

$$TE_i = \beta_0 + \beta_1 BELMOD_i + \beta_2 DAU_i + \mu_i$$

Keterangan:

$TK_i$  = Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

$TE_i$  = *Tax Effort* (upaya pajak daerah)

$DAU_i$  = Dana Alokasi Umum.

$BELMOD_i$  = Belanja Modal

$\beta (0,1,2)$  = parameter.

$\mu_i$  = *error term*.

## F. Metode Analisis Data

### 1. Analisis Regresi dan Uji Asumsi Klasik

Analisis regresi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda (*multiple linear regression*). Data yang telah didapatkan akan diolah dengan menggunakan program SPSS. Agar



mendapatkan hasil akhir yang akurat maka diperlukan beberapa pengujian yang mendasari suatu model regresi seperti uji asumsi klasik.

Uji asumsi klasik akan dilakukan sebelum menguji hipotesis seperti yang telah dikembangkan dalam bab sebelumnya. Beberapa uji asumsi klasik yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain:

**a. Uji Normalitas**

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model analisis yang digunakan untuk melakukan pengujian adalah *one-sample kolmogrov-Smirnov Test*. Model regresi dikatakan memiliki residual berdistribusi normal apabila Asymp. Sig (2-tailed) diatas signifikansi sebesar 0,05.

**b. Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat korelasi antara *error term* pada periode  $t_1$  dengan *error term* pada periode  $t_2$  (Gujarati, 1995:63-64). Autokorelasi dapat terjadi jika nilai gangguan dalam periode tertentu berhubungan dengan gangguan sebelumnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi sehingga dapat lebih efisien.

Asumsi autokorelasi diuji dengan menggunakan Uji Durbin Watson. Nilai Durbin Watson merupakan dasar untuk menentukan

apakah telah terjadi autokorelasi atau tidak. Untuk mendapatkan nilai Durbin Watson, maka dilakukan pengolahan data melalui SPSS. Setelah itu dilakukan perbandingan antara nilai Durbin Watson yang diperoleh dengan nilai Durbin Watson dari tabel. Apabila nilai Durbin Watson yang diperoleh lebih besar dari nilai tabel, maka dapat disimpulkan dalam model regresi tidak terdapat autokorelasi.

**c. Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Dalam penelitian ini pengujian terhadap multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan nilai *Tolerance*. Batas terjadinya multikolinearitas adalah nilai  $VIF > 10$  dan nilai  $Tolerance < 0,10$ .

**d. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik

adalah yang homokedastisitas atau tidak heteroskedastisitas. Uji heterokedastisitas dalam penelitian ini diuji dengan scatterplots.

## G. Pengujian Hipotesis

### 1. Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui tingkat ketepatan yang paling baik dalam analisis regresi, di mana hal ini ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi ( $R^2$  *adjusted*) antara nol dan satu atau  $0 \leq R^2 \leq 1$ . Jika  $R^2$  mendekati 1, ini menunjukkan bahwa variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat sehingga model yang digunakan dapat dikatakan baik. Sedangkan bila nilai  $R^2$  mendekati 0, berarti bahwa variabel bebas sama sekali tidak berpengaruh terhadap variabel terikat sehingga model yang digunakan semakin kurang tepat.

### 2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F menunjukkan apakah variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Sehingga dengan uji F dapat menjadi dasar dalam pengambilan kesimpulan mengenai ada atau tidaknya pengaruh belanja modal dan dana alokasi umum terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan *tax effort*.

Pengujian koefisien regresi dengan menggunakan uji F untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah:

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$ , artinya tidak ada pengaruh yang signifikan dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen.

$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$ , artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Hipotesis nol diterima jika tingkat kemandirian keuangan daerah dan *tax effort* tidak dipengaruhi secara bersama-sama oleh belanja modal dan dana alokasi umum. Hipotesis nol ditolak apabila salah satu atau beberapa parameter ( $\beta$ ) tidak sama dengan nol

### 3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara individual maka dilakukan pengujian dengan uji t.

Pengujian koefisien regresi dengan menggunakan uji t untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah:

$H_0 : \beta_1 = 0$ , artinya tidak ada pengaruh yang signifikan dari suatu variabel independen terhadap variabel dependen.

$H_a : \beta_1 \neq 0$ , artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari suatu variabel independen terhadap variabel dependen.

Apabila tingkat signifikansi yang diperoleh (*p-value*) lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis alternatif dapat diterima atau variabel independen tersebut berpengaruh secara individu terhadap variabel dependennya.

## BAB IV

### ANALISIS HASIL PENELITIAN

#### A. Populasi dan Sampel

Populasi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota wilayah Eks Karesidenan Surakarta. Adapun Kabupaten/Kota yang menjadi sampel penelitian adalah sebanyak 7 (tujuh) sampel dengan runtut waktu sebanyak 56 observasi yaitu dari tahun 2001-2008:

Tabel 4.1 Kabupaten/Kota Sampel

Kabupaten/Kota
Kota Surakarta
Kabupaten Boyolali
Kabupaten Sukoharjo
Kabupaten Karanganyar
Kabupaten Wonogiri
Kabupaten Sragen
Kabupaten Klaten

Sumber: [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, dapat dilihat bahwa kabupaten / kota yang menjadi sampel sebanyak 7 Kabupaten / Kota di wilayah Eks Karesidenan Surakarta yang meliputi 56 observasi, kemudian dihilangkannya sampel yang diindikasikan mengandung *outlier*, sehingga dihasilkan sampel akhir yaitu sebanyak 7 kabupaten / kota yang meliputi 51 observasi untuk periode pengamatan 2001-2008.

## **B. Upaya Peningkatan Pajak Daerah Di Wilayah Eks Karisedenan Surakarta**

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa aparatur pemerintah daerah pada DPPKA Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Surakarta, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan dari sektor pajak daerah dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain tenaga profesional, sarana prasaran, teknologi informasi, dan jaringan kerjasama.

Dari segi tenaga profesional upaya yang dilakukan adalah dibentuk tim-tim penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak seperti petugas pungut, mantri pajak dan peningkatan kualitas aparatur DPPKAD. Sedangkan dari sisi sarana dan prasarana pemerintah daerah menggunakan banner untuk mensosialisasikan PBB, serta melakukan penyuluhan melalui acara televisi di TA tv. Untuk segi teknologi informasi digunakan website untuk memudahkan para pengguna khususnya investor untuk menggali informasi masing-masing daerah sehingga diharapkan dapat meningkatkan pajak daerah. Selain itu untuk mempermudah pengelolaan keuangan daerah Kota Surakarta dan Kabupaten Klaten menggunakan SIMDA (sistem informasi manajemen keuangan daerah). Dari sisi jaringan kerja sama, kota Surakarta, pemerintah kota bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Poltabes Surakarta. Dalam Undang-Undang nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dipertegas dengan Peraturan Pemerintah

Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dan didukung dengan Peraturan Daerah Nomor : 9 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah, yaitu bahwa tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah menegakkan Peraturan Daerah, maka upaya atau kebijakan Pemerintah Daerah dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah harus melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini merupakan tantang tersendiri bagi Satuan Polisi Pamong Praja untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan daerah. Di Kabupaten Klaten dan Kabupaten Karanganyar bekerja sama dengan seluruh kabupaten/kota se Eks Karesidenan Surakarta dalam rangka peningkatan pajak daerahnya.

Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karesidenan Surakarta telah semaksimal mungkin untuk meningkatkan PAD melalui pajak daerah, tetapi hasilnya PAD hanya mampu menopang pembiayaan pembangunan hanya sekitar 20%-30% dari total penerimaan. Hasil penelitian Badan Peneliti dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri bekerja sama dengan Universitas Gajah Mada, Syarifuddin Tayeb menyatakan bahwa dari 292 (dua ratus sembilan puluh dua) Daerah Kabupaten yang diteliti menunjukkan rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pembiayaan daerah yaitu :

- a. 122 Daerah Kabupaten berkisar antara 0,53 % - 10 %
- b. 86 Daerah Kabupaten berkisar antara 10 % - 20 %

- c. 43 Daerah Kabupaten berkisar antara 20,1 % - 30 %
- d. 17 Daerah Kabupaten berkisar antara 31,1 % - 50 %
- e. 2 Daerah Kabupaten berkisar di atas 50 %

Rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pembiayaan daerah, karena daerah hanya diberikan kewenangan mobilisasi sumber dana pajak dan yang mampu memenuhi hanya sekitar 20% - 30% dari total penerimaan untuk membiayai kebutuhan rutin dan pembangunan, sementara 70% - 80% didrop dari pusat. Selain itu hambatan dikarenakan oleh potensi pajak daerah sebagai komponen PAD rendah dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak juga berpengaruh terhadap penerimaan daerah dari sektor pajak daerah.

### C. Statistik Deskriptif Penelitian

Dalam penelitian ini, statistik deskriptif variabel dependen dan variabel independen disajikan dalam tabel 4.2 dan 4.3 berikut:

**Tabel 4.2. Statistik Deskriptif Untuk Variabel Dependen Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BELANJAMODAL	51	3E+010	2E+011	8E+010	4,413E+010
DANAALOKASIUUMUM	51	1E+011	7E+011	4E+011	1,450E+011
TINGKATKEMANDIRIAN	51	4,20	15,40	7,7667	2,44268
Valid N (listwise)	51				

Sumber : Hasil pengolahan data statistik



### **Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

Variabel dependen yang pertama adalah tingkat kemandirian keuangan daerah. tingkat kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Muliana, 2009).

Nilai rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah adalah 7,76 dengan nilai minimum 4,20 dan nilai maksimum 15,40. Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah terendah adalah Kabupaten Klaten pada tahun 2001 , Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah adalah Kota Surakarta. Nilai yang diperoleh oleh Kabupaten/Kota adalah 7,76% hal ini berarti tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota masih tergolong rendah, Kabupaten /Kota masih sangat tergantung dengan pemerintah pusat.

Untuk variabel belanja modal nilai rata-rata yang diperoleh adalah 82,52 milyar rupiah dengan nilai minimum 2,7 milyar rupiah dan nilai maksimum 174,4 milyar rupiah. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

Untuk variabel dana alokasi umum nilai rata-rata yang diperoleh 371,12 milyar dengan nilai minimum 111,63 milyar dan nilai maksimum 744,6 milyar. Dana alokasi umum merupakan sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Dana alokasi umum merupakan salah satu komponen belanja pada [APBN](#), dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada [APBD](#). Tujuan dana alokasi umum (DAU) adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Muliana (2009) menyatakan semakin kecil jumlah dana alokasi umum (DAU) suatu kabupaten/kota maka akan semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah

### *Tax Effort*

**Tabel 4.3. Statistik Deskriptif Untuk Variabel Dependen *Tax Effort***

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BELANJAMODAL	51	1,95E+010	1,7E+011	7,824E+010	4,303E+010
DANAALOKASIUMUM	51	1,12E+011	7,4E+011	3,612E+011	1,515E+011
TAXEFFORT	51	,03	,32	,1859	,05266
Valid N (listwise)	51				

Sumber : Hasil pengolahan data statistik

Variabel dependen kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah *tax effort*. *Tax Effort* menunjukkan jumlah pajak yang sungguh-sungguh dikumpulkan oleh kantor pajak. Angka *tax effort* diperoleh dengan membagi penerimaan pajak daerah kota x dengan kapasitas pajak daerah x.

Nilai rata-rata *tax effort* adalah 0,18 dengan nilai minimum 0,03 dan nilai maksimum 0,32. Kabupaten/Kota yang memiliki *tax effort* terendah adalah Kabupaten Wonogiri pada tahun 2001 yang hanya mampu mengumpulkan pajak daerah sebesar 0,03% dari total kapasitas pajaknya, sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki *tax effort* adalah Kota Sragen yang mampu mengumpulkan pajak daerah sebesar 0,32% dari total kapasitas pajaknya. Nilai *tax effort* yang diperoleh oleh Kabupaten/Kota adalah 0,18 % dari total kapasitas pajaknya hal ini berarti Kabupaten/Kota belum cukup baik dalam mengumpulkan pajak daerahnya. Menurut Adi (2006) *tax effort* suatu daerah dikatakan baik apabila hasilnya mendekati 1.

Untuk variabel belanja modal nilai rata-rata yang diperoleh adalah 78,24 milyar rupiah dengan nilai minimum 19,5 milyar rupiah dan nilai maksimum 174,4 milyar rupiah. Untuk variabel dana alokasi umum nilai rata-rata yang diperoleh 361,12 milyar dengan nilai minimum 111,63 milyar dan nilai maksimum 744,6 milyar.

#### **D. Pengujian Asumsi Klasik**

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, model regresi penelitian ini diuji dengan uji asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik diperlukan agar interpretasi hasil dari analisis regresi tidak terganggu dan diperoleh adanya ketepatan model. Dalam pengujian asumsi klasik, asumsi-asumsi yang digunakan adalah asumsi normalitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

## 1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah residual (*disturbance*) dalam model regresi terdistribusi secara normal. Pengujian dilakukan dengan menggunakan analisis *One-Sample Kolmogorof-Smirnov Test*. Aturan yang digunakan untuk menguji kenormalan residual adalah apabila nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* tidak signifikan pada tingkat 5%, maka residu berdistribusi normal.

### Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

**Tabel 4.4. Hasil Uji Normalitas Untuk Variabel Dependen Tingkat**

#### Kemandirian Keuangan Daerah

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		51
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,12281190
Most Extreme Differences	Absolute	,131
	Positive	,131
	Negative	-,083
Kolmogorov-Smirnov Z		,936
Asymp. Sig. (2-tailed)		,345

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Hasil pengolahan data statistik

Tabel 4.4. menunjukkan hasil uji normalitas untuk variabel dependen Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, berdasarkan hasil pengujian terhadap residual, diketahui RES\_1 memiliki nilai *Kolmogorof-Smirnov* sebesar 0,936 dan *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,345 di atas tingkat signifikansi sebesar 0,05. Dengan demikian asumsi residual berdistribusi normal terpenuhi.

*Tax Effort***Tabel 4.5. Hasil Uji Normalitas Untuk Variabel Dependen Tax Effort**

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>			Unstandardized Residual
N			51
Normal Parameters	a,b	Mean	,0000000
		Std. Deviation	,04920331
Most Extreme Differences		Absolute	,064
		Positive	,044
		Negative	-,064
Kolmogorov-Smirnov Z			,457
Asymp. Sig. (2-tailed)			,985

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Hasil pengolahan data statistik

Tabel 4.5. menunjukkan hasil uji normalitas untuk variabel dependen *Tax Effort*, berdasarkan hasil pengujian terhadap residual, diketahui RES\_1 memiliki nilai *Kolmogorof-Smirnov* sebesar 0,457 dan Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,985 di atas tingkat signifikansi sebesar 0,05. Dengan demikian asumsi residual berdistribusi normal terpenuhi.

## 2. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara *error term* pada periode  $t_1$  dengan *error term* pada periode  $t_2$  (Gujarati, 1995). Pengujian ini dilakukan dengan

menggunakan uji Durbin-Watson. Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengandung autokorelasi.

Dalam Gujarati (1995) cara untuk menentukan ada tidaknya autokorelasi adalah:

Jika  $0 < \text{Durbin-Watson} < d_L$ , maka terbukti terjadi autokorelasi positif.

Jika  $d_L < \text{Durbin-Watson} < d_U$ , dan  $4-d_U < \text{Durbin-Watson} < 4-d_L$ , maka tidak dapat disimpulkan.

Jika  $d_U < \text{Durbin-Watson} < 4-d_U$ , maka tidak terjadi autokorelasi.

Jika  $4-d_L < \text{Durbin-Watson} < 4$ , maka terbukti terjadi autokorelasi negatif.

## Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

**Tabel 4.6. Hasil Uji Autokorelasi untuk Variabel Dependen Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,495 <sup>a</sup>	,245	,213	2,16659	1,976

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal, Dana Alokasi Umu

b. Dependent Variable: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Sumber : Hasil pengolahan data statisti

Nilai Durbin Watson yang diperoleh adalah sebesar 1,976. Menurut tabel nilai Durbin-Watson pada sampel = 51 dan K= 2 adalah  $d_L = 1,462$  dan  $d_U = 1,625$ .

Berdasarkan aturan pengambilan keputusan terjadi autokorelasi atau tidak di atas, maka nilai Durbin-Watson dalam penelitian sebesar 1,976 lebih besar dari

batas atas ( $d_U$ ) 1,625 dan kurang dari 2,375 ( $4 - d_U$ ), maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi residual.

### *Tax Effort*

**Tabel 4.7. Hasil Uji Autokorelasi untuk Variabel Dependen *Tax Effort***

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,356 <sup>a</sup>	,127	,090	,05022	2,067

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal, Dana Alokasi Umum

b. Dependent Variable: Tax Effort

Sumber : Hasil pengolahan data statistik

Nilai Durbin Watson yang diperoleh adalah sebesar 2,067. Menurut tabel nilai Durbin-Watson pada sampel = 51 dan K = 2 adalah  $d_L = 1,462$  dan  $d_U = 1,625$

Berdasarkan aturan pengambilan keputusan terjadi autokorelasi atau tidak di atas, maka nilai Durbin-Watson dalam penelitian sebesar 2,067 lebih besar dari batas atas ( $d_U$ ) 1,584 dan kurang dari 2,375 ( $4 - d_U$ ), maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi residual.

### **3. Uji Multikolinearitas**

Multikolinearitas merujuk pada adanya hubungan linear sempurna diantara variabel penjelas dalam suatu model regresi (Gujarati, 1995). Uji yang digunakan adalah *Variance Inflation Factor* (VIF). Sebagai aturan pengambilan keputusan adalah jika VIF melebihi 10 berarti terdapat multikolinearitas.

Kedua model di dalam penelitian ini baik untuk variabel dependen *tax effort* dan tingkat kemandirian daerah tidak mengandung multikolinearitas. Hal ini ditunjukkan melalui nilai VIF dari masing-masing variabel independen kurang dari 10, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 4.8. Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel Independen (Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah)	Tolerance	VIF	KETERANGAN
Belanja Modal	0,426	2,345	Tidak terjadi multikolinearitas
Dana Alokasi Umum	0,426	2,345	Tidak terjadi multikolinearitas
Variabel Independen ( <i>Tax Effort</i> )			
Belanja Modal	0,375	2,667	Tidak terjadi multikolinearitas
Dana Alokasi Umum	0,375	2,667	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Lampiran 4 (Output Uji Multikolinearitas)

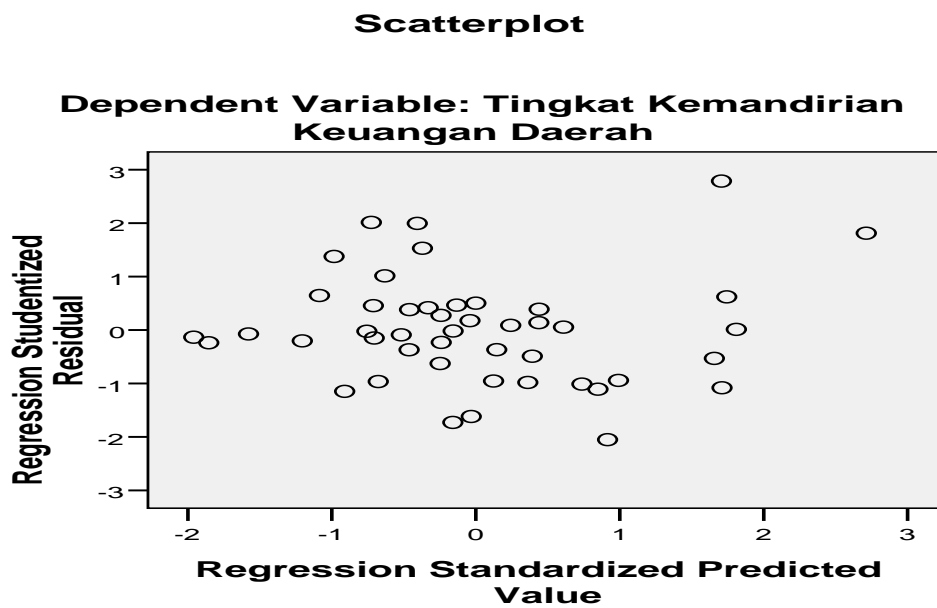
#### 4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak heteroskedastisitas. Uji heterokedastisitas dalam penelitian ini diuji dengan scatterplots.

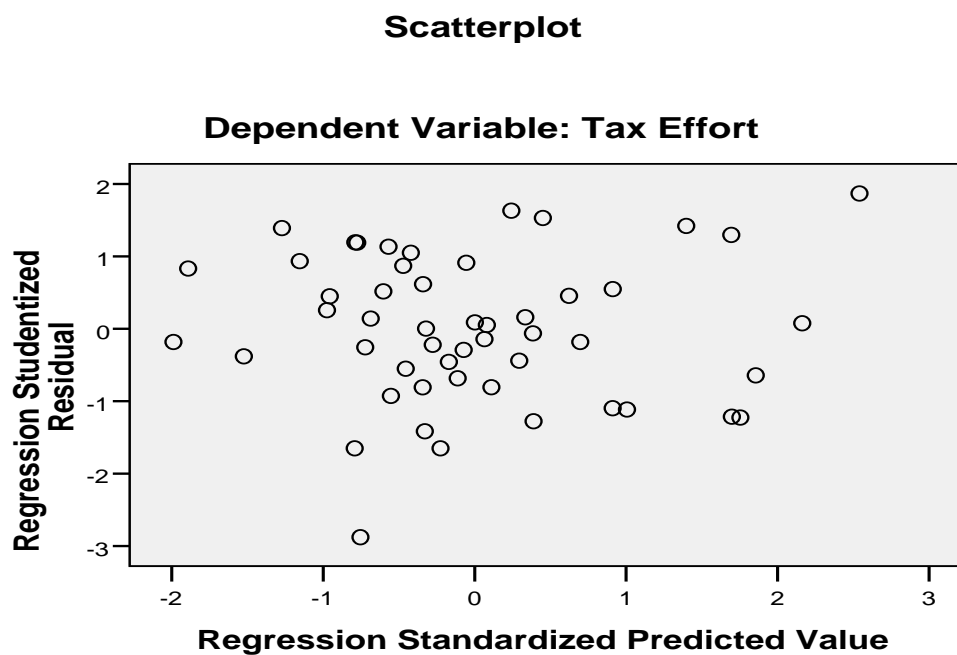


## Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Gambar 4.1. Uji Heteroskedastisitas Variabel Dependen Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah



Hasil uji heteroskedastisitas variabel dependen tingkat kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa titik-titik tersebar di atas dan di bawah angka nol. Titik-titik menyebar dan tidak membentuk pola tertentu yang teratur sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi heteroskedas.

*Tax Effort***Gambar 4.2. Uji Heteroskedastisitas Variabel Dependen *Tax Effort***

Hasil uji heteroskedastisitas variabel dependen *tax Eeffort* menunjukkan bahwa titik-titik tersebar di atas dan dibawa angka nol. Titik-titik menyebar dan tidak membentuk pola tertentu yang teratur sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

**E. Hasil Pengujian Hipotesis**

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan program SPSS 15. Pengujian dilakukan dengan analisis regresi berganda dengan meregresi satu persatu variabel dependen dengan dua variabel independen. Untuk melihat

signifikansi model regresi digunakan uji F, yakni dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel pada probabilitas 5%. Sedangkan untuk menguji setiap variabel hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t, dimana dalam menarik kesimpulan nilai t hitung dibandingkan dengan nilai t tabel pada tingkat probabilitas 5%.

### 1. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variable dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara 0 dan 1. Nilai koefisien determinasi dapat kita lihat dari nilai *adjusted R<sup>2</sup>* pada *model summary* pada hasil analisis regresi linier berganda karena jumlah variabel independennya lebih dari satu variabel

### Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

**Tabel 4.9. Koefisien Determinasi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,495 <sup>a</sup>	,245	,213	2,16659

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal, Dana Alokasi Umum

b. Dependent Variable: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Sumber : Hasil pengolahan data statistik

Hasil uji regresi menunjukkan nilai *adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,213 atau 21,3%. Hal ini menunjukkan 21,3% tingkat kemandirian daerah dapat dijelaskan oleh variabel dana alokasi umum dan belanja modal. Sedangkan 78,7 % dijelaskan oleh faktor lain diluar model penelitian.

### *Tax Effort*

**Tabel 4.10. Koefisien Determinasi Tax Effort**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,356 <sup>a</sup>	,127	,090	,05022

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal, Dana Alokasi Umum

b. Dependent Variable: *Tax Effort*

Sumber : Hasil pengolahan data statistik

Hasil uji regresi menunjukkan nilai *adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,090 atau 9%. Hal ini menunjukkan 9% *tax effort* dapat dijelaskan oleh variabel dana alokasi umum dan belanja modal. Sedangkan 91 % dijelaskan oleh faktor lain diluar model penelitian.

## 2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Hipotesis alternatif yang digunakan untuk untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara seperangkat variabel-variabel independen dengan masing-masing variabel dependen yaitu tingkat kemandirian keuangan daerah dan *tax effort* adalah:

**H<sub>a1</sub> = Belanja modal dan dana alokasi umum berpengaruh secara bersama- sama terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.**

**H<sub>a2</sub> = Belanja modal dan dana alokasi umum berpengaruh secara bersama- sama terhadap *tax effort*.**

Hasil uji F untuk variabel dependen *tax effort* dan tingkat kemandirian daerah adalah:

**Tabel 4.11 Hasil Uji F untuk Variabel Dependen Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	73,017	2	36,508	7,778	,001 <sup>a</sup>
	Residual	225,317	48	4,694		
	Total	298,333	50			

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal, Dana Alokasi Umum

b. Dependent Variable: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Sumber : Hasil pengolahan data statistik

Tabel ANOVA<sup>b</sup> diatas menunjukkan nilai F yang diperoleh sebesar 7,778. Sedangkan nilai F tabel pada tingkat probabilitas sebesar 0,05 adalah 3,18 dengan probabilitas 0,001. Karena F hitung lebih besar dari F tabel dan probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi tingkat kemandirian daerah atau dapat dikatakan bahwa dana alokasi umum dan belanja modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

**Tabel 4.12 Hasil Uji F untuk Variabel Dependen *Tax Effort***

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,018	2	,009	3,487	,039 <sup>a</sup>
	Residual	,121	48	,003		
	Total	,139	50			

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal, Dana Alokasi Umum

b. Dependent Variable: *Tax Effort*

Sumber : Hasil pengolahan data statistik

Tabel ANOVA<sup>b</sup> diatas menunjukkan nilai F yang diperoleh sebesar 3,487. Sedangkan nilai F tabel pada tingkat probabilitas sebesar 0,05 adalah 3,18 dengan probabilitas 0,039. Karena F hitung lebih besar dari F tabel dan probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi *tax effort* atau dapat dikatakan bahwa dana alokasi umum dan belanja modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap *tax effort*.

### 3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Sedangkan untuk menguji pengaruh setiap variabel independen dan variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan dengan melakukan uji t. Hasil uji t yang diperoleh dari masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel 4.13. dan tabel 4.14. :

**Tabel 4.13 Hasil Uji t untuk Variabel Dependen Tingkat Kemandirian  
Keuangan Daerah**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,386	,842		9,963	,000
	BELANJA MODAL	4,14E-011	,000	,748	3,893	,000
	DANAALOKASI UMUM	-1,1E-011	,000	-,645	-3,359	,002

a. Dependent Variable: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Sumber : Hasil pengolahan data statistik

### **Belanja Modal**

Hipotesis alternatif untuk melihat pengaruh profitabilitas adalah:

**H<sub>1</sub> : Belanja Modal berpengaruh terhadap tingkat kemandirian  
keuangan daerah.**

Hasil pengujian pada tabel 4.13 diatas menunjukkan tanda koefisien dari belanja modal adalah positif dengan  $t$  hitung sebesar  $3,893 > t$  tabel  $2,0076$  dan tingkat signifikansi sebesar  $0,000$ . Dari hasil tersebut nilai Sig. adalah signifikan pada  $\alpha = 5\%$ , sehingga hipotesis nol mampu untuk ditolak. Dengan menolak hipotesis nol, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dapat menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh secara signifikan positif. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizky dan Suryo (2009) yang menemukan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian daerah. Tingkat kemandirian keuangan daerah ditunjukkan dengan kontribusi PAD untuk membiayai belanja-belanja daerahnya termasuk belanja modal. Apabila pembiayaan belanja modal sebagian besar berasal dari Pendapatan Asli Daerah maka dapat dikatakan daerah tersebut mandiri, karena daerah tersebut tidak mengandalkan pembiayaan belanja modal dari pemberian transfer pemerintah pusat.

### **Dana Alokasi Umum**

Hipotesis alternatif untuk melihat pengaruh profitabilitas adalah:

**H<sub>2</sub> : Dana alokasi umum berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.**

Hasil pengujian pada tabel 4.12 diatas menunjukkan tanda koefisien dari DAU adalah negatif dengan t hitung sebesar  $3,359 > t$  tabel  $2,0076$  dan tingkat signifikansi sebesar  $0,002$  Dari hasil tersebut nilai Sig. adalah signifikan pada  $\alpha = 5\%$ , sehingga hipotesis nol mampu untuk ditolak. Dengan menolak hipotesis nol, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dapat menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap tingkat kemandirian daerah.



Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muliana (2009) yang menemukan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh secara signifikan negatif, jika Dana alokasi umum bertambah atau meningkat maka akan mengurangi tingkat kemandirian daerah. Pemberian transfer pemerintah seperti DAU seharusnya hanya bersifat mendukung bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Semakin kecil DAU dalam menopang pembiayaan daerah diharapkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemberian transfer pemerintah pusat akan semakin rendah sehingga kemandirian daerah akan terwujud.

**Tabel 4.14 Hasil Uji t untuk Variabel Dependen *Tax Effort***

		Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,175	,018		9,538	,000
	BELANJA MODAL	6,82E-013	,000	,557	2,530	,015
	DANAALOKASI UMUM	-1,2E-013	,000	-,338	-1,537	,131

a. Dependent Variable: Tax Effort

Sumber : Hasil pengolahan data statistik

### **Belanja Modal**

Hipotesis alternatif untuk melihat pengaruh likuiditas adalah:

**H<sub>3</sub> : Belanja modal berpengaruh *tax effort*.**

Hasil pengujian pada tabel 4.13 diatas menunjukkan tanda koefisien dari belanja modal adalah positif dengan t hitung sebesar  $2,530 > t$  tabel  $2,0076$  dan tingkat signifikansi sebesar  $0,015$  Dari hasil tersebut nilai Sig. adalah signifikan pada  $\alpha = 5\%$ , sehingga hipotesis nol mampu untuk ditolak. Dengan menolak hipotesis nol, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dapat menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap *tax effort*.

Hasil penelitian menunjukkan belanja modal berpengaruh signifikan positif terhadap *tax effort*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wong (2004) yang menunjukkan pembangunan sektor industri tertentu (dalam hal ini sektor jasa dan retail) memberikan kontribusi positif terhadap kenaikan pajak. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002). Dengan terpenuhinya fasilitas publik maka masyarakat merasa nyaman dan dapat menjalankan usahanya dengan baik sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pembangunan.

**Dana Alokasi Umum**

Hipotesis alternatif untuk melihat pengaruh DAU (dana alokasi umum) adalah:

**H<sub>4</sub> : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Tax Effort.**

Hasil pengujian pada tabel 4.13 diatas menunjukkan tanda koefisien dari DAU adalah negatif dengan t hitung sebesar  $1,537 > t$  tabel  $2,0076$  dan tingkat signifikansi sebesar  $0,131$ . Dari hasil tersebut nilai Sig. adalah tidak signifikan pada  $\alpha = 5\%$ , sehingga hipotesis nol tidak mampu untuk ditolak. Dengan menerima hipotesis nol, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dapat tidak menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap *tax effort*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh priyo (2008) dan Brodjonegoro dan Vasques (2002) yang menunjukkan bahwa pemberian transfer atau dana perimbangan yang terencana tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap upaya pengumpulan pajak di tingkat lokal (daerah). Sarug dan Sagbas (2008) menemukan bahwa didaerah yang tergolong miskin menyikapi pemberian transfer sebagai substitusi pendapatan daerah, bukan sebagai stimulus, apabila efek substitusi ditemukan maka mengindikasikan pemerintah daerah mengeluarkan lebih sedikit DAU sehingga mengurangi pajak daerahnya. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Nagathan dan Sigvagnanam (1999) yang menemukan hasil yang signifikan negatif DAU terhadap *tax effort* dengan tingkat signifikansi  $10\%$ .

Hasil penelitian ini menolak hipotesis yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap *tax effort*, menurut Kuncoro (2004) peningkatan alokasi transfer diikuti penggalian PAD yang cukup tinggi. Di sisi lain, peningkatan alokasi transfer juga diikuti dengan pertumbuhan pengeluaran yang lebih tinggi. Gejala ini memperlihatkan bahwa birokrat pemerintah daerah

bertindak sangat reaktif terhadap transfer yang diterima dari pusat. Ada indikasi peningkatan pengeluaran yang tinggi tersebut disebabkan karena inefisiensi pengeluaran pemerintah daerah terutama pengeluaran rutin. Kecenderungan ini dalam jangka panjang akan berakibat pada peningkatan ketidakmerataan fiskal secara horizontal.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Setelah dilakukan analisis hasil pembahasan pada bab IV, maka pada bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan hasil penelitian, implikasi, keterbatasan dan saran untuk peneliti selanjutnya.

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel independen dalam hal ini belanja modal dan dana alokasi umum berpengaruh dan secara bersama-sama mampu menjelaskan tingkat kemandirian keuangan daerah dan *tax effort* di Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karesidenan Surakarta.
2. Hasil penelitian ini berhasil membuktikan adanya pengaruh yang signifikan positif dari variabel independen belanja modal dan pengaruh signifikan negatif dana alokasi umum terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Untuk variabel dependen *tax effort* belanja modal mempunyai pengaruh signifikan positif sedangkan dana alokasi umum tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap *tax effort*.
3. Upaya pajak daerah yang telah dilakukan oleh 3 (tiga) Kabupaten/Kota di wilayah eks karesidenan Surakarta yaitu : Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Klaten sudah cukup maksimal dari berbagai

segi seperti anggaran, tenaga profesional, teknologi informasi, sarana prasarana dan jaringan kerja sama. Tetapi upaya tersebut belum mampu menjadikan Pendapatan Asli Daerah yang didalamnya termasuk pajak daerah sebagai sumber utama pembiayaan daerah hal ini disebabkan oleh potensi pajak itu sendiri rendah dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah.

## **B. Implikasi**

Implikasi yang dapat dikaji dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, seharusnya pemberian dana alokasi umum dijadikan stimulus untuk pemerintah daerah/kota untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah, sehingga pemerintah daerah diharapkan mampu untuk menggali pendapatan asli daerahnya salah satunya dengan meningkatkan upaya pajak (*tax effort*) melalui reformasi pajak daerah yaitu dengan meniadakan pajak yang tidak produktif dan juga melalui peningkatan retribusi daerah sehingga sumber pembiayaan pengelolaan pembangunan dapat ditopang oleh PAD dan tidak terlalu tergantung pada dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat.
2. Dalam upaya peningkatan tingkat kemandirian keuangan daerah pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan

yang dimiliki dan salah satunya dengan memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif. Pergeseran komposisi belanja ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD.

### C. Keterbatasan dan Saran

1. Tingkat *Adjusted R<sup>2</sup>* yang rendah dari model yang diuji 0,213 untuk variabel dependen tingkat kemandirian keuangan daerah dan 0,090 untuk variabel dependen *Tax Effort* dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap tingkat kemandirian daerah dan *tax effort* sehingga sebaiknya untuk penelitian-penelitian selanjutnya mempertimbangkan untuk menggunakan variabel lainnya seperti belanja daerah secara menyulur dan dana perimbangan selain dana alokasi umum, sehingga bisa dilihat faktor lain yang mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah dan *tax effort*.
2. Sampel penelitian ini dibatasi pada Kabupaten/Kota tertentu yaitu 7 Kabupaten/Kota di Wilayah Eks Karesidenan Surakarta. Hal ini menyebabkan hasil penelitian hanya berlaku untuk kabupaten/kota yang menjadi sampel penelitian, sehingga belum dapat digeneralisasi untuk

kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan sampel yang lebih luas dan menggunakan laporan Realisasi APBD yang paling mutakhir untuk dapat menggambarkan kondisi yang paling terbaru.

3. Penelitian ini mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah dan *tax effort* selama pelaksanaan otonomi daerah, diharapkan penelitian selanjutnya dapat membandingkan dua indikator kinerja keuangan daerah tersebut sebelum dan sesudah otonomi daerah.



## DAFTAR PUSTAKA

Adi, Priyo Hari. 2006. *Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan Dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)*. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang.

\_\_\_\_\_. 2008. *Relevansi Transfer Pemerintah pusat dengan Upaya Pajak Daerah*. Jurnal Kritis. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.

BAPPENAS dan UNDP. 2008. *Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah. Building and Reinventing Decentralised Governance*.

Bati. 2009. *Pengaruh Belanja Modal dan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.

Brodjonegoro, Bambang dan Jorge Martine-Vasquez. 2002. *An Analysis of Indonesia's Transfer System : Recent Performance and Future Prospect*. George State University. Andrew Young School of Policy Studies. Working Paper.

Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang

Gujarati, Damodar N. 1995. *Basic Econometrics*. Third Edition. McGraw-Hill: New York.

Halim, Abdul. 2002, *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.

Haryanto. *Kemandirian Daerah Sebuah Perspektif dengan Metode Path Analysis*.

<http://www.bps.go.id>. Diakses pada Tanggal 12 Februari 2010.

<http://www.bpk.go.id>. Diakses pada tanggal 3 Agustus 2009.

<http://www.djpk.depkeu.go.id> Diakses pada tanggal 5 Agustus 2009.

<http://www.jatengprov.go.id/beritaskpd>. Diakses pada tanggal 17 Juni 2010.

<http://www.wikipedia.org/wiki/Penelitian> Kualitatif. Diakses pada tanggal 12 Juni 2010.

Ismi Rizky dan Suryo. 2009. *Pengaruh PAD dan Belanja Pembangunan terhadap rasio kemandirian dan pertumbuhan ekonomi*. Konferensi Penelitian Keuangan Sektor Publik II.

Kuncoro, Haryo. 2004. *Pengaruh Transfer Antar Pemerintah Pada Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol 9. No.1, Juni 2004.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit ANDI. Yogyakarta.

Muliana. 2009. *Pengaruh Rasio Efektivitas PAD, DAU, dan DAK terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.

Mulyanto. 2007. *Aspek dan Dimensi Keuangan Daerah di Era Otonomi dan Desentralisasi*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Piancastelli, Marcelo. 2001. *Measuring The Tax Effort Of Developed And Developing Countries. Cross Country Panel Data Analysis — 1985/95*. Instituto de Pesquisa Economica Aplicada. Rio de Janeiro.

Republik, Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*

—————.. 2004. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

- \_\_\_\_\_. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Saruc, Naci Tolga dan Isa Sagbas. 2008. *The Surge Impact of the Flypaper, Substitution and Stimulation Effect on Local Tax Effort in Turkey*. International Research Journal of Finance and Economics. EuroJournals Publishing, Inc.
- Sivagnanam, K., Jothi dan M., Naganathan. 1999. *Federal Transfers And The Tax Efforts Of The States In India*. MPRA Paper No. 3208, 07 November 2007.
- Syahputra, Adi. 2006. *Perpajakan*. USU Repository. Sumatra Utara.
- Tampubolon, Jongkers dkk. 2002. *Desentralisasi Fiskal di Indonesia: Studi Kasus -Potensi Peningkatan PAD Kabupaten Tapanuli Utara*. Lembaga Penelitian Universitas HKBP Nommensen.
- Wong, John D. 2004. *The Fiscal Impact of Economic Growth and Development on Local Government Capacity*. Journal of Public Budgeting., Accounting and Financial Management. Fall.

**LAMPIRAN 1**

**REKAP DATA KEUANGAN KABUPATEN/KOTA**

**2001-2008**

**REKAP DATA KEUANGAN KABUPATEN/KOTA**

**2001-2008**

**(dalam jutaan rupiah)**

Tahun	Daerah	PDRB (Harga Berlaku)	Pajak Daerah	Realisasi PAD	Belanja Modal	DAU	Total Pendapatan
2001	Kota Surakarta	6.885.040,16	15.880,30	35.852,03	19.511,28	111.630,28	216.027,25
	Kabupaten Boyolali	3.667.412,64	2.989,75	17.675,17	30.829,46	212.748,56	257.634,49
	Kabupaten Sukoharjo	4.082.867,70	5.837,95	14.787,71	33.192,33	154.866,42	211.957,61
	Kabupaten Karanganyar	4.204.900,45	5.499,09	16.550,71	35.044,68	199.130,49	253.490,64
	Kabupaten Wonogiri	2.155.550,69	638,63	14.224,17	36.526,75	239.731,59	280.772,98
	Kabupaten Sragen	2.545.299,21	2.921,45	15.884,60	44.105,49	215.887,28	257.094,27
	Kabupaten Klaten	2.852.750,98	4.834,84	13.832,06	27.542,98	111.630,28	331.562,60
	2002	Kota Surakarta	7.709.124,66	20.943,45	45.112,37	53.360,28	178.390,00
Kabupaten Boyolali		4.094.565,11	4.334,37	24.460,33	52.998,48	250.946,37	325.257,09
Kabupaten Sukoharjo		4.559.524,47	9.232,66	18.555,32	36.180,58	213.634,14	265.092,76
Kabupaten Karanganyar		4.540.464,58	8.613,16	23.188,52	45.470,82	222.497,81	289.482,69
Kabupaten Wonogiri		2.346.166,24	4.541,78	23.108,19	61.954,02	253.974,33	325.063,87
Kabupaten Sragen		2.816.225,59	4.180,03	24.347,95	54.040,24	238.900,00	304.172,00
Kabupaten Klaten		3.257.308,80	6.312,72	17.519,44	46.809,36	331.679,05	387.763,52
2003		Kota Surakarta	8.695.549,81	24.657,00	54.815,68	94.446,36	232.342,00
	Kabupaten Boyolali	4.328.535,59	5.820,78	32.781,31	77.012,21	292.070,00	389.246,88
	Kabupaten Sukoharjo	4.990.446,03	9.315,89	19.929,27	64.889,60	273.518,05	338.998,07
	Kabupaten Karanganyar	5.068.844,89	10.007,81	25.196,92	71.101,59	266.550,00	357.223,48
	Kabupaten Wonogiri	2.640.833,48	5.007,56	25.998,75	88.785,08	311.090,00	403.978,35
	Kabupaten Sragen	3.096.945,35	4.934,43	42.976,69	109.572,47	271.940,00	405.554,28
	Kabupaten Klaten	3.604.880,28	8.605,56	22.288,97	111.641,04	409.386,14	499.848,53
	2004	Kota Surakarta	4.250.098,73	7.819,08	36.960,02	13.492,01	218.045,00
Kabupaten Boyolali		5.475.849,75	10.291,54	27.047,60	49.428,77	313.635,55	501.906,04
Kabupaten Sukoharjo		4.806.448,20	11.284,65	21.701,84	29.516,31	281.710,73	354.676,30
Kabupaten Karanganyar		3.129.184,54	5.358,00	25.290,37	42.525,06	277.906,00	419.984,77
Kabupaten Wonogiri		5.038.378,68	11.572,41	29.485,26	70.184,96	326.104,00	373.132,45
Kabupaten Sragen		3.059.653,16	6.957,12	43.547,11	43.164,37	283.621,00	395.271,90
Kabupaten Klaten		4.756.559,52	27.395,76	59.632,52	29.841,86	382.345,00	365.405,61
2005	Kota Surakarta	4.250.098,73	6.984,06	49.816,91	10.175,44	218.082,00	439.245,33

	Kabupaten Boyolali	5.475.849,75	8.875,53	29.084,66	57.414,55	310.078,00	529.739,19
	Kabupaten Sukoharjo	4.806.448,20	11.920,72	30.384,47	31.152,65	272.531,00	380.338,17
	Kabupaten Karanganyar	3.129.184,54	5.401,13	35.101,10	63.466,26	284.448,00	413.974,96
	Kabupaten Wonogiri	5.038.378,68	13.158,09	34.302,57	69.302,79	336.549,00	391.630,90
	Kabupaten Sragen	3.059.653,16	8.072,13	42.848,55	57.196,31	306.460,00	411.992,26
	Kabupaten Klaten	4.756.559,52	29.089,22	66.169,01	31.048,53	404.869,00	373.629,93
2006	Kota Surakarta	4.250.098,73	9.442,75	59.307,28	63.883,25	334.287,00	630.290,11
	Kabupaten Boyolali	5.475.849,75	10.310,59	33.920,00	74.010,25	492.181,00	760.141,00
	Kabupaten Sukoharjo	4.806.448,20	13.568,96	44.008,08	75.652,00	421.438,00	549.271,17
	Kabupaten Karanganyar	3.129.184,54	6.417,83	47.864,48	79.250,65	421.432,00	656.393,84
	Kabupaten Wonogiri	5.038.378,68	13.158,09	44.935,62	154.512,19	523.439,00	546.611,25
	Kabupaten Sragen	3.059.653,16	8.859,37	52.019,76	113.623,24	466.851,00	617.931,70
	Kabupaten Klaten	4.756.559,52	35.702,61	78.637,87	83.645,56	635.488,00	510.880,03
2007	Kota Surakarta	4.250.098,73	10.643,17	67.461,52	127.254,38	374.501,00	707.982,74
	Kabupaten Boyolali	5.475.849,75	12.689,83	42.547,07	158.187,03	528.505,00	873.759,24
	Kabupaten Sukoharjo	4.806.448,20	10.454,24	42.449,91	123.087,29	460.662,00	615.262,20
	Kabupaten Karanganyar	3.129.184,54	7.257,95	50.329,50	107.531,63	459.156,00	726.402,35
	Kabupaten Wonogiri	5.038.378,68	19.053,56	56.923,92	92.138,57	556.874,00	641.317,36
	Kabupaten Sragen	3.059.653,16	14.532,97	65.257,98	174.442,69	513.575,00	740.548,29
	Kabupaten Klaten	4.756.559,52	41.404,08	89.430,98	138.749,67	694.207,00	601.429,87
2008	Kota Surakarta	4.250.098,73	11.155,04	63.733,41	163.614,68	420.911,72	782.528,35
	Kabupaten Boyolali	5.475.849,75	18.026,87	49.549,62	124.533,01	528.505,00	976.911,47
	Kabupaten Sukoharjo	4.806.448,20	15.421,73	41.898,32	112.595,42	498.935,69	687.729,03
	Kabupaten Karanganyar	3.129.184,54	8.055,01	54.129,29	149.886,54	505.641,50	841.402,41
	Kabupaten Wonogiri	5.038.378,68	21.874,87	64.470,68	144.349,17	598.932,85	771.365,02
	Kabupaten Sragen	3.059.653,16	11.958,35	65.803,10	170.554,06	551.265,97	804.376,67
	Kabupaten Klaten	4.756.559,52	46.855,62	102.989,92	144.478,23	744.676,78	751.267,16

**DATA TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH dan TAX  
EFFORT**

**KABUPATEN/KOTA 2001-2008**

Tahun	Daerah	Tingkat Kemandirian Daerah	<i>Tax Effort</i>
2001	Kota Surakarta	16,6	0,23
	Kabupaten Boyolali	6,7	0,09
	Kabupaten Sukoharjo	7,0	0,14
	Kabupaten Karanganyar	6,5	0,13
	Kabupaten Wonogiri	5,1	0,03
	Kabupaten Sragen	6,2	0,11
	Kabupaten Klaten	4,2	0,17
	2002	Kota Surakarta	16,9
Kabupaten Boyolali		7,5	0,1
Kabupaten Sukoharjo		7,0	0,2
Kabupaten Karanganyar		8,0	0,18
Kabupaten Wonogiri		7,1	0,19
Kabupaten Sragen		8,0	0,15
Kabupaten Klaten		4,5	0,19
2003		Kota Surakarta	15,4
	Kabupaten Boyolali	8,4	0,13
	Kabupaten Sukoharjo	5,9	0,18
	Kabupaten Karanganyar	7,1	0,2
	Kabupaten Wonogiri	6,4	0,19
	Kabupaten Sragen	10,6	0,16
	Kabupaten Klaten	4,5	0,23
	2004	Kota Surakarta	16,3
Kabupaten Boyolali		9,1	0,18
Kabupaten Sukoharjo		6,1	0,23
Kabupaten Karanganyar		7,9	0,23
Kabupaten Wonogiri		6	0,17
Kabupaten Sragen		11	0,23
Kabupaten Klaten		5,4	0,19
2005		Kota Surakarta	17,5
	Kabupaten Boyolali	11,3	0,15
	Kabupaten Sukoharjo	7,9	0,21
	Kabupaten Karanganyar	8,7	0,23
	Kabupaten Wonogiri	8,5	0,16

	Kabupaten Sragen	10,4	0,23
	Kabupaten Klaten	5,5	0,14
2006	Kota Surakarta	15,4	0,58
	Kabupaten Boyolali	9,4	0,18
	Kabupaten Sukoharjo	8	0,22
	Kabupaten Karanganyar	8,2	0,21
	Kabupaten Wonogiri	7,3	0,16
	Kabupaten Sragen	8,4	0,22
	Kabupaten Klaten	4,4	0,14
2007	Kota Surakarta	14,8	0,6
	Kabupaten Boyolali	9,5	0,19
	Kabupaten Sukoharjo	6,8	0,15
	Kabupaten Karanganyar	8,9	0,27
	Kabupaten Wonogiri	6,9	0,16
	Kabupaten Sragen	8,9	0,32
	Kabupaten Klaten	4,8	0,15
2008	Kota Surakarta	13,7	0,59
	Kabupaten Boyolali	8,1	0,17
	Kabupaten Sukoharjo	6,1	0,19
	Kabupaten Karanganyar	8,3	0,28
	Kabupaten Wonogiri	6,4	0,15
	Kabupaten Sragen	8,2	0,23
	Kabupaten Klaten	5,1	0,19



## **LAMPIRAN 2**

### **OUTPUT UJI NORMALITAS**

## Hasil Uji Normalitas Untuk Variabel Dependen Tingkat Kemandirian Keuangan

### Daerah

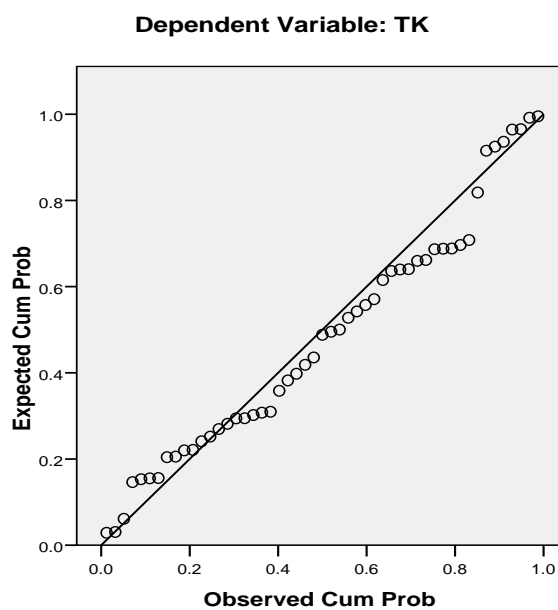
#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		51
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,12281190
Most Extreme Differences	Absolute	,131
	Positive	,131
	Negative	-,083
Kolmogorov-Smirnov Z		,936
Asymp. Sig. (2-tailed)		,345

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

#### Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



### Hasil Uji Normalitas Untuk Variabel Dependen *Tax Effort*

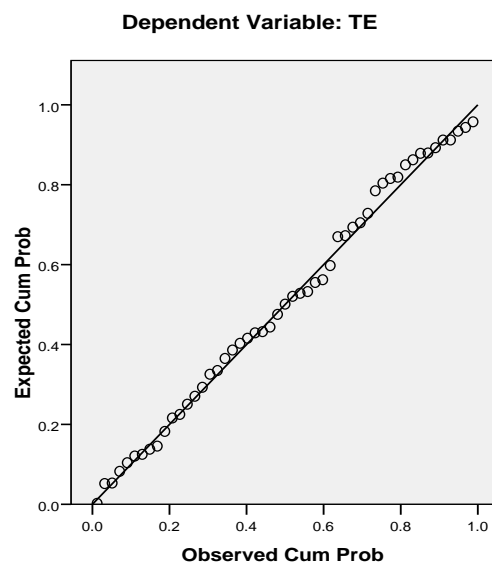
#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		51
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,04920331
Most Extreme Differences	Absolute	,064
	Positive	,044
	Negative	-,064
Kolmogorov-Smirnov Z		,457
Asymp. Sig. (2-tailed)		,985

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

#### Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



**LAMPIRAN 3****OUTPUT UJI AUTOKORELASI**

### Hasil Uji Autokorelasi Variabel Dependen Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

#### Variables Entered/Removed<sup>b</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	BELMOD, DAU <sup>a</sup>	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: TK

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,495 <sup>a</sup>	,245	,213	2,16659	1,976

a. Predictors: (Constant), DAU, BELMOD

b. Dependent Variable: TK

### Hasil Uji Autokorelasi Variabel Dependen Tax Effort

#### Variables Entered/Removed<sup>b</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	BELMOD, DAU <sup>a</sup>	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: TE

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,356 <sup>a</sup>	,127	,090	,05022	2,067

a. Predictors: (Constant), DAU, BELMOD

b. Dependent Variable: TE

## **LAMPIRAN 4**

### **OUTPUT UJI MULTIKOLINEARITAS**

## Hasil Uji Multikolinearitas Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

### Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	DAU, BELMOD (a)	.	Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: TK

### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8,386	,842		9,963	,000		
	BELMOD	4,14E-011	,000	,748	3,893	,000	,426	2,345
	DAU	-1,1E-011	,000	-,645	-3,359	,002	,426	2,345

a. Dependent Variable: TK

### Coefficient Correlations(a)

Model		DAU	BELMOD
1	Correlations		
	DAU	1,000	-,757
	BELMOD	-,757	1,000
	Covariances		
	DAU	1,05E-023	-2,61E-023
	BELMOD	-2,61E-023	1,13E-022

a Dependent Variable: TK



### Hasil Uji Multikolinearitas *Tax Effort*

#### Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	DAU, BELMOD (a)	.	Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: TE

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,175	,018		9,538	,000		
	BELMOD	6,82E-013	,000	,557	2,530	,015	,375	2,667
	DAU	-1,2E-013	,000	-,338	-1,537	,131	,375	2,667

a. Dependent Variable: TE

#### Coefficient Correlations(a)

Model			DAU	BELMOD
1	Correlations	DAU	1,000	-,791
		BELMOD	-,791	1,000
	Covariances	DAU	5,86E-027	-1,63E-026
		BELMOD	-1,63E-026	7,26E-026

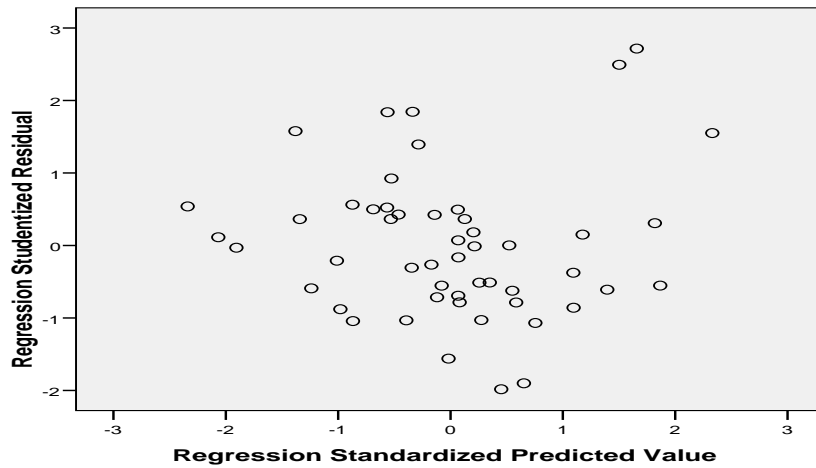
a Dependent Variable: *Tax Effort*

**LAMPIRAN 5****OUTPUT UJI HETEROSKEDASTISITAS**

## Hasil Uji Heteroskedastisitas Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

### Scatterplot

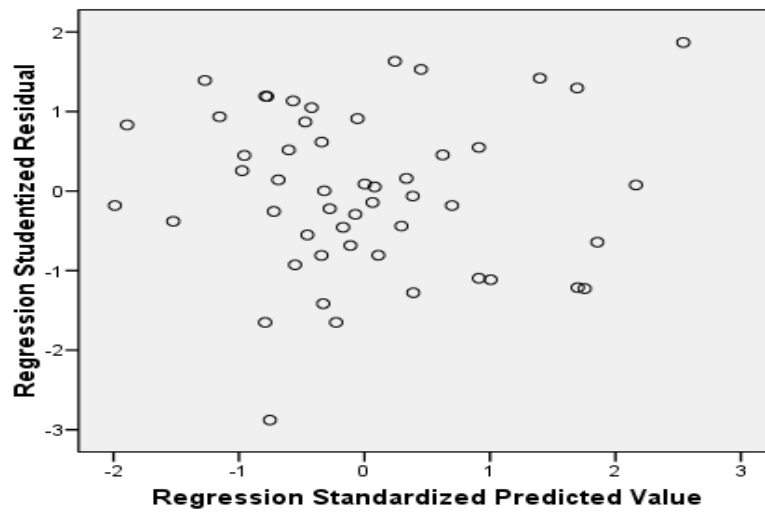
Dependent Variable: TK



## Hasil Uji Heteroskedastisitas *Tax Effort*

### Scatterplot

Dependent Variable: TE



**LAMPIRAN 6****OUTPUT UJI REGRESI**

## Hasil Uji Regresi Variabel Dependen Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

### Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	BELMOD, DAU(a)	.	Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,495(a)	,245	,213	2,16659

a Predictors: (Constant), DAU, BELMOD

### ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	73,017	2	36,508	7,778	,001(a)
	Residual	225,317	48	4,694		
	Total	298,333	50			

a Predictors: (Constant), DAU, BELMOD

b Dependent Variable: Tingkat kemandirian Keuangan Daerah

### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,386	,842		9,963	,000
	BELMOD	4,14E-011	,000	,748	3,893	,000
	DAU	-1,1E-011	,000	-,645	-3,359	,002

a. Dependent Variable: Tingkat kemandirian Keuangan Daerah

### Hasil Uji Regresi Variabel Dependen *Tax Effort*

#### Variables Entered/Removed<sup>b</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	BELMOD, DAU	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: TE

#### Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,356(a)	,127	,090	,05022

a Predictors: (Constant), DAU, BELMOD

b Dependent Variable: *Tax Effort*

#### ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,018	2	,009	3,487	,039(a)
	Residual	,121	48	,003		
	Total	,139	50			

a Predictors: (Constant), DAU, BELMOD

b Dependent Variable: *Tax Effort*

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,175	,018		9,538	,000
	BELMOD	6,82E-013	,000	,557	2,530	,015
	DAU	-1,2E-013	,000	-,338	-1,537	,131

a. Dependent Variable: *Tax Effort*